

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DIGITALISASI UMKM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI WILAYAH BANGKA BELITUNG

Wahyu Hidayat

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungailiat Bangka, Indonesia

Email : wahyujulio99@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang bagi bidang ekonomi khususnya pada sektor UMKM untuk bertransformasi menjadi UMKM yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi UMKM. Namun keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk go digital. Permasalahan inilah yang kemudian membuat pemerintah harus bersinergi dan berkolaborasi agar pelaku UMKM dapat terlibat dalam pasar digital sekaligus untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan stakeholder lainnya dalam meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam pasar digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM di wilayah Bangka Belitung secara umum sudah berjalan dengan maksimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil kajian analisis penelitian melalui 5 tahapan dalam proses collaborative governance menurut Ansell dan Gash yaitu; tahap dialog atau *face to face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan program yang dijalankan. Kelima tahapan tersebut sudah dijalankan secara maksimal, sehingga mendapatkan respon positif dari para pelaku UMKM karena menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk menjawab tantangan menghadapi era revolusi industri 4.0. Namun meski demikian masih terdapat kendala yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menggunakan internet terlebih bagi kelompok para pelaku UMKM yang usianya sudah tua. Rekomendasi bagi pemerintah untuk terus menguatkan literasi digital kepada masyarakat agar perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan oleh masyarakat terutama dalam digitalisasi UMKM menghadapi revolusi industri 4.0.

Kata kunci; Collaborative, Governance, digitalisasi dan UMKM

Abstract: The development of information technology is an opportunity for the economy, especially in the MSME sector to transform into MSMEs based on information technology or the digitization of MSMEs. However, the skills and abilities of the community in the use of information technology are a challenge for MSME actors to go digital. This problem then makes the government have to synergize and collaborate so that MSME players can be involved in the digital market as well as to face the 4.0 industrial revolution. The purpose of this study is to determine the collaboration process carried out by the government with other stakeholders in increasing the involvement of MSME actors in the digital market. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through documentation. Data collection techniques were carried out through interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that the collaborative governance process in encouraging the development of the digitization of MSMEs in the Bangka Belitung region in general has been running optimally. This is shown by the results of the analysis of research through 5 stages in the collaborative governance process according to Ansell and Gash, namely; dialogue or face to face stage, building trust, commitment to the process, mutual understanding, and the program being run. The five stages have been carried out optimally, so that they get a positive response from MSME actors because they are a solution for MSME actors to answer the challenges of facing the 4.0 industrial revolution era. However, there are still obstacles, namely the lack of ability and skills of MSME actors in using the internet, especially for groups of MSME actors who are old. Recommendations for the government to continue to strengthen digital



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

literacy to the community so that technological developments can be utilized by the community, especially in digitizing MSMEs facing the industrial revolution 4.0.

Keywords: Collaborative, Governance, digitalization and SMEs

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-07-26; Direvisi 2022-08-26; Disetujui: 2022-09-22

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga dan memegang peranan penting dalam perekonomian negara. UMKM didasarkan atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara seringkali berubah menjadi krisis ekonomi. Usaha Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis dengan segala aspek manfaat dan potensi yang ada di dalamnya. UMKM berperan penting dalam perekonomian dan telah banyak memberikan kontribusi, baik terhadap penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB, ekspor dan sebagainya. (UMKM) salah satu penggerak utama roda perekonomian negara Indonesia. UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional. Dari 64 juta lebih UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50 persen UMKM didirikan dan dijalankan oleh perempuan (Hidayat, 2020).

Pada tahun 2021, strategi pemasaran bukan hanya terbatas pada promosi dengan cara konvensional atau bisa disebut dengan offline, tapi sudah memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Inilah yang dimaksud dengan digitalisasi. digitalisasi adalah sebuah langkah memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan promosi. Sektor UMKM juga termasuk ke golongan yang membutuhkan konsep digitalisasi demi mengikuti kemajuan zaman. Konsep ini bisa juga disebut dengan digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis merupakan proses yang mengubah komunikasi, interaksi dan segala manfaat dalam bisnis dari yang konvensional menjadi digital atau virtual. Proses digitalisasi ini meliputi banyak hal, mulai dari pengenalan dan penggunaan media sosial sebagai media pemasaran, metode transaksi cashless sampai bagaimana cara pelaku UMKM mengelola bisnisnya untuk membuat kinerja pelaku bisnis menjadi lebih efisien (N, 2021)

Perkembangan Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0, karena di era industri 4.0 semua bidang mengandalkan teknologi informasi, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang bagi bidang ekonomi khususnya pada sektor UMKM untuk bertransformasi menjadi UMKM yang berbasis teknologi informasi atau digitalisasi UMKM. disisi lain perkembangan revolusi industri 4.0 meJadi sebuah tantangan bagi pelaku UMKM berupa kemampuan dan penyesuaian agar dapat terus bertahan. Selain itu, Sejak adanya pandemi Covid-19 semakin sulit untuk melakukan aktivitas di luar rumah, karena kita harus mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu jaga jarak (social distancing). Termasuk juga bagi para pelaku bisnis yang dengan sangat terpaksa membatasi jam operasional usahanya, atau malah harus menutup usahanya total. Karena itulah, momen pandemi ini dirasa sangat tepat untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media pemasaran bagi UMKM. Namun sayangnya perkembangan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan perkembangan digitalisasi. Hal ini terbukti dengan Tingkat digitalisasi sektor usaha kecil dan menengah masih sangat rendah. Padahal, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci memasuki era 4.0 (Faidati N, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pada Juni 2020 baru 13 persen UMKM yang menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya. Dalam hal ini artinya jumlah UMKM yang bertransformasi ke digitalisasi sangat rendah. Hal ini mejadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendorong masyarakat agar beralih kepada digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.

Potret penggunaan internet di Bangka Belitung secara umum lebih kurang sama dengan potret nasional. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 20 % dari total pelaku UMKM di Bangka Belitung sudah memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya. tetapi, masih ada pekerjaan yang sangat besar untuk mendorong sisa pelaku UMKM sebesar 80% untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya. Hal ini lah yang menjadi pokok permasalahan yang harus diselesaikan agar pelaku UMKM di Bangka Belitung dapat memanfaatkan teknologi internet maupun ponsel pintar untuk berbisnis.

UKM dan pemerintah perlu bersinergi dimana nantinya UKM ini dapat mengaplikasikan teknologi yang dikembangkan pemerintah atau stakeholder lain agar minimal pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan sarana dalam penggunaan internet dan ponsel pintar dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

gotong royong bersama baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mendukung gerakan digitalisasi bagi para pelaku UMKM (Maria, 2021).

Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi dari beberapa elemen terkait, baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat secara langsung dan yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, N., 2012:48). Dalam konteks ini, proses penyiapan pelaku UMKM agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, korporasi dan asosiasi terkait, seperti komunitas digital marketer dan asosiasi bisnis. Konsep kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik lebih dikenal dengan istilah Collaborative Governance. Berdasarkan Latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kerjasama atau kolaborasi pemerintah baik dengan pihak swasta, masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam mendorong para pelaku UMKM menuju UMKM yang berbasis digital agar mampu beradaptasi menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di wilayah Bangka Belitung.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait Collaborative Governance dalam menyelesaikan permasalahan publik. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Faidati dan Nur Fitri (2019). Peneliti berusaha mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY. Penelitian bertujuan untuk membantu mengembangkan pelaku UMKM di DIY dalam proses adaptasi dan mempercepat kesiapan pelaku UMKM merespon revolusi industri 4.0 perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, korporasi maupun civil society. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari masing-masing stakeholder. Collaborative Governance Process dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 belum optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran (L Winarni, Afni, 2021)

Penelitian lain terkait collaborative governance juga dilakukan oleh Liliek Winarni, Ika Nur Afni, Riska Wirawan (2021). Peneliti berusaha mengkaji seberapa jauh peran yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan penelitian untuk mengetahui collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maron dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta pihak swasta yaitu komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator collaborative governance menurut DeSeve yang belum tercapai yaitu belum adanya komitmen yang kuat pada semua stakeholder, belum adanya kepercayaan yang kuat antar stakeholder, belum adanya aturan resmi terkait kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas serta belum akses sumber daya yang masih terbatas terutama anggaran dan juga prasarana.

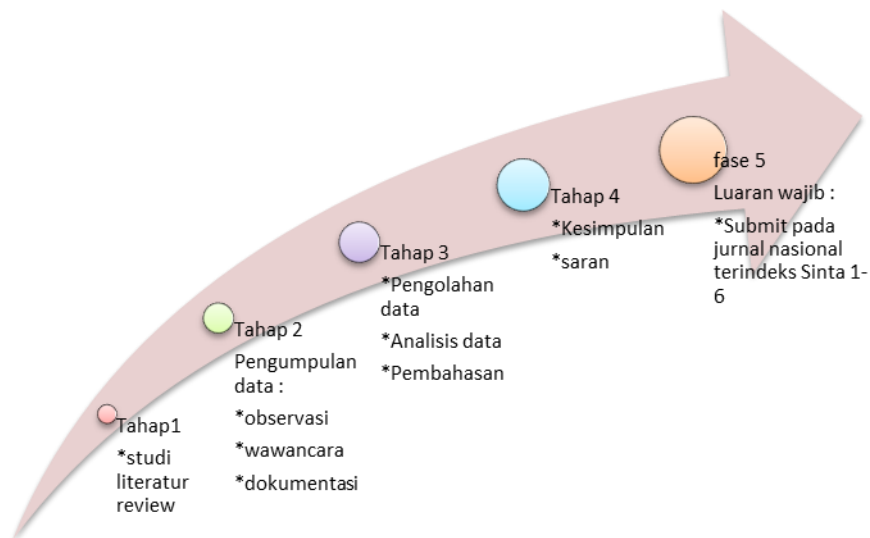
Berdasarkan literatur review tersebut, maka penelitian dilakukan untuk menambah khazanah kajian terkait dengan collaborative governance dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam konteks penelitian ini adalah peran yang dijalankan oleh para kolaborator (Pemerintah, masyarakat dan swasta) untuk membantu para pelaku UMKM beralih kepada UMKM yang go digital atau digitalisasi UMKM dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, di Bangka Belitung.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Menurut Sugiyono (2017:21) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Dalam mengkaji penelitian ini berfokus pada kolaborasi pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini adalah dinas koperasi dan UKM, dinas perindustrian dan perdagangan pihak swasta dalam mendorong pengembangan digitalisasi UMKM. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari studi literatur yang mengaji dan relevan terhadap tema penelitian. Kemudian tahap kedua pengumpulan data berasal dari dua jenis data, yakni data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Tahap ketiga berupa analisis data dan pembahasan. Tahap keempat berupa hasil penelitian yang berakhir pada kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu kepada konsep kolaborasi, bahwa kolaborasi merupakan langkah atau tindakan untuk mempersatukan semua pihak maupun non pemerintah untuk mengelola dan mengatur semua urusan secara bersama untuk mencapai tujuan dan hasil dengan efektif dan efisien. Dalam proses *collaborative Governance* dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM, dalam hal ini pemerintah melibatkan beberapa pihak terkait baik swasta maupun masyarakat seperti Dinas KUMKM Provinsi Bangka Belitung, PLUT, Disperindag, *Marketplace* baik lokal maupun nasional serta masyarakat para pelaku UMKM. Namun dalam proses kolaborasi tersebut tentu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ada beberapa tahapan dalam proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash yaitu, *Face to face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan program yang dijalankan. Hasil penelitian dan pengkajian terhadap kelima tahapan proses tersebut diuraikan secara terperinci sebagai berikut;

1. *Face to face*

Dalam proses *Collaborative Governance* tahap *face to face* merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan sebagai proses konsensus untuk mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama dalam kolaborasi. *Face to face* atau dialog bersama merupakan tahap awal untuk menyediakan ruang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan program dan ide-ide yang nantinya dapat dilakukan secara bersama-sama.

Pada proses kolaborasi pemerintah dalam mendorong perkembangan digitalisasi UMKM di Bangka Belitung, dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya dialog bersama yang melibatkan beberapa pihak-pihak terkait seperti; Dinas KUMKM Provinsi Bangka Belitung, PLUT, Disperindag, Bank Sumsel Babel, *Marketplace* baik lokal maupun nasional serta masyarakat para pelaku UMKM. Dengan adanya tahap dialog tersebut melahirkan beberapa ide atau program-program yang nantinya dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan digitalisasi UMKM di Bangka Belitung. Dimana program atau rencana-rencana tentunya sangat membutuhkan kolaborasi dan kerjasama baik pemerintah, stakeholder, swasta maupun para pelaku UMKM.

Dalam proses dialog yang dilaksanakan masing-masing stakeholder memberikan ide-ide atau gagasan tentang program atau rencana yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalnya pemerintah pusat berkolaborasi dengan Dinas KUMKM, serta *Marketplace* dalam menggerakkan para pelaku UMKM untuk go *marketplace*. Dalam proses dialog tersebut juga pemerintah menghadirkan beberapa marketplace nasional



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

seperti Buka Lapak, Tokopedia dan Shopee untuk berkolaborasi dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM tentang cara menjual produk di *marketplace*. Dalam dialog atau pertemuan juga pemerintah turut menghadirkan pihak perbankan untuk berkolaborasi dalam hal pemodal dan transaksi digital.

Jadi pada tahap awal ini pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah melakukan upaya pertemuan dengan beberapa pihak atau *stakeholders* yang mempunyai peran penting dalam proses kolaborasi pengembangan digitalisasi UMKM. Proses *face to face* juga menjadi faktor yang sangat penting dalam proses kolaborasi karena menjadi tahap awal yang harus dilakukan agar tercipta program-program yang dapat dilakukan secara bersama-sama.

2. Membangun Kepercayaan

Dalam sebuah proses kolaborasi adanya saling kepercayaan diantara satakeholders menjadi faktor yang sangat penting. Kepercayaan antara pemerintah, stakeholder dan masyarakat didasarkan pada keyakinan bahwa partisipan meyakini akan tugas, peran dan usaha serta informasi dari masing-masing patisipan dalam rangka membangun proses kolaborasi demi tujuan bersama.

Dalam rangka membangun keprcayaan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya, dalam hal ini pemerintah melalui Dinas KUMKM telah mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) beserta para konsultan yang bertugas memberikan pembinaan dan edukasi melalui pendekatan-pendekatan langsung kepada para pelaku UMKM. Selain itu PLUT juga mendirikan galeri sebagai tempat atau wadah untuk membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produk baik secara *online* maupun *offline*. Kedua, kepercayaan yang dibangun oleh para pelaku UMKM ditunjukkan dengan sikap antusiasme dalam mengikuti setiap pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi yang diselenggarakan oleh Dinas KUMKM melalui PLUT yang berkolaborasi dengan *marketplace* seperti Buka Lapak dan Tokopedia. Selain itu kepercayaan para pelaku UMKM juga ditunjukkan dengan kesediaan para pelaku UMKM menjual produk di galeri PLUT yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ketiga, kepercayaan yang dibangun oleh pihak bank yaitu dengan memberikan seponsor kepada para pelaku UMKM dalam program transaksi digital melalui Qris. Kelima, sikap saling percaya juga dilakukan dengan adanya perjanjian kerja sama atau MoU antara pemerintah dan marketpale serta perjanjian kerjasama antara PLUT dengan masyarakat para pelaku UMKM.

Jadi pada proses kolaborasi ini masing-masing pihak sudah memberikan keprcayaan satu sama lain. yang mana kepercayaan ini menjadi modal besar dalam membengun sebuah kolaborasi yang akan menghasilkan keuntungan dari masing-masing pihak. Kepercayaan adalah harapan yang sesuai dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian merupakan penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan bertransaksi (Pavlou, 2002 dalam Priansa, 2017:116). Maka faktor kepepercayaan ini menjadi satu fase yang penting dalam proses kolaborasi untuk membentuk komitmen dalam menjalankan sebuah proses kolaborasi.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses adanya tanggungjawab itikad baik untuk saling menguntungkan dengan cara terbaik dalam mencapai kebijakan dan tujuan bersama. Komitmen yang dilakukan pihak pemerintah dan staakeholder terkait pengembangan digitalisasi UMKM di Bangka Belitung yaitu pertama, komitmen yang ditunjukkan pihak pemerintah kepada para pelaku UMKM dan stakeholder lainya yakni dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis digital marketing secara intens kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut sebagai wujud pemerintah memilki tanggungjawab dan komitmen dalam menjalankan program digitalisasi UMKM. Karena Pemerintah dalam hal ini tentu memiliki target agar seluruh para pelaku UMKM di Bangka Belitung beralih ke pasar digital atau go digital. Berdasarkan data dari Dinas KUMKM Bangka Belitung saat ini sudah lebih dari 500 pelaku UMKM sudah terdaftar di *marketplace* dan media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsApp*.

Selain itu pemerintah dalam hal ini melalui PLUT terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada para Pelaku UMKM secara berkelanjutan tidak hanya saat melakukan pelatihan saja. Namun Pendampingan terus dilakukan minimal 20 kali pendampingan dalam satu tahun pada setiap pelaku UMKM dan dilaporkan perkembanganya setiap akhir tahun kepada Dinas KUMKM Provinsi Bangka Belitung. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Abdul selaku konsultan bidang pemasaran PLUT Babel. Beliau menjelaskan bahwa;

“Sebagai bentuk komitmen kami dalam mendorong digitaliasasi UMKM, saya selaku konsultan bidang pemasaran dan rekan saya konsultan bidang IT berkomitmen minimal 1 bulan sekali melaksanakan pelatihan pemasaran *online*. kemudian setelah itu para pserta pelaku UMKM yang sudah mengikuti pelatihan tersebut akan diikutsertakan kembali dalam bimbingan teknis digital marketing yang dilaksanakan minmal 2 kali dalam 1 tahun. Namun untuk digitalisasi UMKM itu selalu edukasi setiap hari setiap kita kelapangan”

Dalam hal ini berarti pemerintah melalui PLUT telah menunjukkan komitmennya dalam proses kolaborasi mendorong para pelaku UMKM Go Digital. Komitmen yang diberikan pemerintah tidak hanya sebatas pelatihan saja namun terus berkelanjutan didampingi oleh para konsultan sampai para pelaku UMKM benar-benar terjun dan menggunkan pasar digital.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Gambar 1. Bimbingan Teknis Digitalisasi UMKM oleh PLUT Babel
 Sumber : Dokumentasi PLUT Babel

Namun dalam proses kolaborasi ini komitmen yang ditunjukkan oleh para pelaku UMKM masih kurang, karena masih ada pelaku UMKM yang belum berkomitmen untuk menerapkan dan beralih ke digitalisasi meskipun sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis. Keterbatasan kemampuan dalam menggunakan internet membuat sebagian masyarakat sulit untuk beralih ke digitalisasi. Hal ini terutama banyak terjadi kepada para pelaku UMKM yang usianya sudah tua. Karena jika dilihat dari usia pelaku UMKM di Bangka Belitung terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok pengusaha muda dan kelompok pengusaha yang usianya sudah tua. Pada kelompok pengusaha yang muda lebih senang menjalankan usahanya melalui digital marketing atau *marketplace*. Namun berbeda halnya dengan para pelaku UMKM yang usianya sudah tua, mereka lebih senang berjualan langsung atau *offline* misalnya dalam kegiatan pameran atau bazar. Selain dilihat berdasarkan usia, kelompok UMKM di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari jenis produk yang dihasilkan yaitu kelompok produk basah dan kelompok produk kering. Mayoritas para pelaku UMKM di Bangka Belitung menghasilkan produk olahan basah atau makanan basah. Yang mana produk olahan basah ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dapat dijual di *marketplace* karena keterbatasan jarak dan waktu pengiriman. Oleh karena itu para pelaku UMKM yang menghasilkan produk basah hanya bisa memasarkan produknya melalui kegiatan bazar, pameran serta media sosial seperti *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*. Jadi jangkauan pasar dan pemasarannya tidak luas hanya jarak-jarak tertentu saja. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku UMKM Bapak Anton selaku pemilik usaha seblak kedai awi bahwa”

” Produk usaha saya ini berupa olahan basah yaitu aneka seblak dan minuman. Selama ini pemasaran yang saya gunakan offline dan online. namun onlinenya hanya sebatas media sosial saja seperti facebook, sataus whatsapp dan instagram. Karena kalau saya jual di shopee atau yang lain produk saya tidak bisa dikirim karena makanan basah”

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa para pelaku UMKM olahan basah tentu memiliki keterbatasan dalam hal pemasaran. Produk olahan basah dapat dijual secara online namun hanya jangkauannya tidak luas karena produk tidak dapat dikirim dengan waktu yang lama. Sedangkan produk olahan kering dan kerajinan tangan dapat dijual diberbagai *marketplace*, sehingga jangkauan pasarnya tentu sangat luas.

4.Saling Memahami

Dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling memahami tentang mengenai apa yang dapat mereka (*stakeholder*) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling mamahami antar satakeholder juga dapat diwujudkan dengan adanya misi-visi dan tujuan bersama. Dalam hal ini sikap saling memahami pada proses kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholder* lainnya dilakukan melalui adanya kesepahaman visi dan tujuan bersama dalam menyerukan UMKM go digital. Misalnya saling adanya kesepahaman antara pihak PLUT dengan komunitas *startup* yang memiliki visi dan misi bersama yaitu menyerukan gerakan UMKM go digital yang kemudian diwujudkan dengan kerjasama dalam pembinaan kepada UMKM secara bersama-sama. Selain itu juga adanya penyatu hatian antara pihak Bank dengan pemerintah, *marketplace* dan pelaku UMKM dalam hal transaksi pembayaran yang go digital seperti pembayaran atau trasaksi melalui Qris. Untuk mewudkan program tersebut tentu harus adanya satu visi misi bersama. Tanpa adanya kesepahaman visi dan misi tentu akan berjalan sendiri-sendiri dan akan sulit untuk mewujudkan tujuan bersama.



This work is licensed under a
 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Namun kelemahan pada tahap proses saling memahami ini adalah belum adanya visi dan misi bersama secara tertulis sebagai penguat dalam memahami tujuan bersama antara pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat. Dengan adanya visi dan misi secara tertulis maka akan semakin mudah dalam menentukan arah dan capaian dalam keberhasilan kolaborasi yang dilakukan.

5. Hasil Sementara

Buah hasil dari proses kolaborasi dapat terwujud dalam bentuk *output* atau program yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Hasil sementara ini akan muncul apabila tujuan memungkinkan adanya keuntungan yang didapatkan dari kolaborasi yang ma relative konkrit.

Sebagai *output* atau hasil dari kolaborasi yang dilakukan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat pelaku UMKM menghasilkan program-program yang berhasil dijalankan. Program-program yang sudah dilakukan dalam kolaborasi seperti program *coaching clinic* atau pendampingan yang dilakukan oleh para konsultan PLUT setiap hari langsung kelapangan. Kemudian program *coaching clinic* tentang pelaporan keuangan. Selain itu juga program bimbingan teknis digital marketing dan program pendampingan pelatihan pemanfaatan platform digital sebagai media promosi dalam pengembangan digitalisasi UMKM. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul selaku konsultan bidang pemasaran PLUT Babel dalam wawancara. Beliau menjelaskan bahwa;

“Program kolaborasi yang sudah dijalankan sejauh ini yang konsisten dilakukan adalah coaching clinic pendampingan kepada pelaku UMKM langsung kelapangan oleh semua konsultan dan itu wajib hukumnya. Kemudian selain itu program bimbingan teknis digital marketing. Kemudian program pendampingan pelatihan pemanfaat platform digital. Coaching clinic tentang pelaporan keuangan, perizinan dll. Namun yang menjadi agenda atau program rutin adalah pendampingan langsung kelapangan itu dilaksanakan setiap hari oleh para konsultan. Untuk kolaborasi biasanya kita lakukan dengan marketplace nasional maupun lokal seperti walan, tokopedia dan buka lapak, serta pihak perbankan”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terdapat beberapa program yang sudah dilaksanakan, dalam kolaborasi digitalisasi diantaranya program pendampingan digitalisasi pemasaran langsung kelapangan seperti pada dokumentasi berikut ini;



Gambar 2. Pendampingan Para Konsultan PLUT Bidang Pemasaran ke Pelaku UMKM di Lapangan
Sumber : Dokumentasi PLUT Babel

Program pendampingan digitalisasi kepada para pelaku UMKM ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan setiap hari oleh para konsultan PLUT dalam mempercepat pengembangan digitalisasi UMKM. Dalam program ini para konsultan terjun langsung kelapangan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemasaran pelaku UMKM. Selain itu melihat sejauh mana progres para pelaku UMKM dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis. Namun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala yang dihadapi. Kemampuan dan keterampilan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital sangat rendah terlebih para pelaku UMKM yang sudah tua, minat mereka untuk menggunakan platform digital sangat minim meskipun pelatihan dilakukan secara terus-menerus.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prose Collaborative Governance dalam peembangan digitalisasi UMKM pada era revolusi indutri 4.0 di Bangka Belitung secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan kolaborasi yang sudah dijalankan oleh pihak pemerintah beserta stakeholder lainnya. Tahapan yang dilakukan yaitu tahapan *face to face*, membangun kepercayaan, komitmen, saling mamahami dan hasil sementara. Namun dari kelima tahapan tersebut masih terdapat tahapan yang belum maksimal yaitu pada tahapan komitmen dan tahapan saling memahami. Pada tahap komitmen, masyarakat para pelaku UMKM belum sepenuhnya berkomitmen untuk beralih ke digital atau *marketplace*. Sedangkan pada tahap saling memahami belum adanya visi dan misi bersama secara tertulis antara pemerintah dan stakeholder lainnya. Kemudian yang menjadi kelemahan juga bahwa dalam proses kolaborasi digitalisasi UMKM hanya ada satu satakeholder yang betul-betul aktif dan mejadi leading sektor yaitu PLUT yang berada dibawah naungan Dinas KUMKM Provinsi Bangka Belitung. Kemudian PLUT juga hanya ada di Pusat Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Belitung, sedangkan di Ibu kota/ kabupaten yang lainnya belum didirikan PLUT sehingga percepatan digitalisasi UMKM sedikit terhambat karena keterbatasan jarak para pelaku UMKM yang ada di kabupaten untuk mengakses PLUT yang ada di Pusat Provinsi Bangka Belitung.

REFERENSI

- Ansel, C. dan Gash, A, 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice., University of California, Berkeley:Oxford Unversity Press.
- Aufar, Arizali. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan InformasiAkuntansi Pada UMKM (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN(Persero) di Kota Bandung)
- Brennen, J. S., & Kreiss, D. 2016. "Digitization" and "digitalization" are two conceptual terms that are closely associated and often used
- Dini N, 2021. Keuntungan yang Didapatkan dari UMKM Go Digital. Dalam <https://majoo.id/blog/detail/keuntungan-yang-didapatkan-dari-umkm-go-digital>
- Feriawan Hidayat, 2020. Digitalisasi UMKM Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta. Dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/701971/digitalisasi-umkm-butuh-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta>
- Faidati N, dan Muthmainah N. 2019. Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Konferensi nasional ilmu administrasi bandung.
- Hang, Hyun Joo. 2009. Collaborative Governance In Welfare Service Delivery : Focusing On Local Welfare in Korea.
- Junaidi. 2015. Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang. Naskah Publikasi Fisip Umrah.
- L Winarni, Afni, Wirawan, 2021. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. Vol. 19, No. 2, Desember 2021, hal. 137 – 143
- Maria Elena, 2021. Kolaborasi dalam Mendukung Digitalisasi UMKM Perlu Terus Didorong. Dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210924/9/1446172/kolaborasi-dalam-mendukung-digitalisasi-umkm-perlu-terus-didorong>
- Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik. Volume 5; 2.
- Tambunan M Rudi, 2013, Pedoman penyusunan Standard operating prosedur, Edisi. 2013, Penerbit Maiesta.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.